

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

Ghina Shinta Wulaning Asri
NPP. 29.0800

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Program
Studi Keuangan Publik*

E-mail : ghina.shinta99@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): The Cilacap Regency Government has a high level of dependence on transfer funds provided by external parties and affects the financial performance of the local government. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the financial performance and factors that hinder the financial performance of the Cilacap Regency local government for the 2017-2020 fiscal year based on regional financial ratio analysis, and to find out the government's efforts to improve the financial performance of the Cilacap Regency local government. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. **Result:** The results showed that the financial performance of the Cilacap Regency government was good, judging from the BPK's WTP (Unqualified) response with several points that needed to be addressed. The level of independence of Cilacap Regency is still very low and still depends on transfer funds. The level of effectiveness and efficiency of PAD, Cilacap Regency has been very effective and efficient. The allocation of priority expenditures for operating expenditures and capital expenditures has been adjusted according to the regulations. The growth ratio based on local revenue, transfer income, and regional expenditure experienced fluctuating growth. Factors that hinder the improvement of local government financial performance include changes in regulations, pandemics, low public awareness and understanding, and policy adjustments with the community. Efforts to improve government financial performance are carried out by intensification and extensification, reward and punishment, non-cash transactions, and increasing innovation. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, the government needs to pay attention in detail to potential sources of revenue, collect data and determine tax subjects and objects on a regular basis, as well as provide training and socialization. **Keywords:** Financial Performance, Local Government, Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan pihak eksternal dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dan faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan

daerah, serta mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Faktor yang menghambat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya perubahan aturan, pandemi, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dengan masyarakat. Upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, *reward* dan *punishment*, adanya transaksi nontunai, dan meningkatkan inovasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis, pemerintah perlu memperhatikan secara detail sumber potensi penerimaan, melakukan pendataan dan penetapan subjek dan objek pajak secara berkala, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi. **Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Analisis Rasio

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia di masa reformasi menerapkan otonomi daerah dengan berasaskan pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa sendiri agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Nahmiati mengatakan bahwa sebagai subsistem pemerintahan negara, pemerintahan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan masyarakat atau mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat (Fathah,2017:34).

Otonomi daerah menimbulkan adanya asas desentralisasi fiskal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan diwujudkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dalam struktur APBN termasuk ke dalam komponen belanja negara yang dikeluarkan setiap tahunnya. Irfan Sofi menjelaskan bahwa TKDD membiayai desentralisasi

fiskal yang meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah Yogyakarta serta dana desa (<https://www.kemenkeu.go.id>). Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2019:82). Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *debt service coverage ratio*, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu dari tiga daerah industri utama di Jawa Tengah selain Semarang dan Surakarta, sehingga menggambarkan Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan yang bersumber dari PAD apabila dikelola secara optimal (<http://p2k.itbu.ac.id>). Namun, besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap belum mampu menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer lebih mendominasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daripada penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1

PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Kabupaten Cilacap TA 2017-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja
2017	648.091.381.096	1.874.953.083.082	3.014.110.475.842
2018	527.577.740.281	1.874.260.346.332	2.985.422.839.102
2019	574.276.795.304	1.928.670.863.364	2.779.740.306.711
2020	591.343.787.160	1.757.591.202.654	2.607.739.427.660

Sumber : Diolah penulis (2021) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan [LRA Kabupaten Cilacap](#)

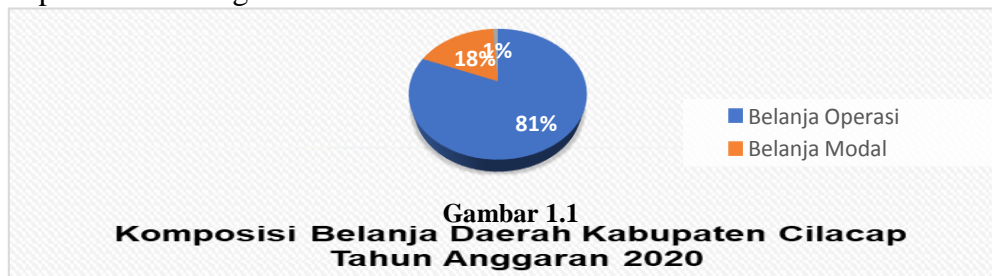
Tabel 1.2

Kontribusi PAD, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap TA 2017-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Total	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
2017	648.091.381.096	3.067.274.791.140	21,1%
2018	527.577.740.281	3.072.112.464.787	17,2%
2019	574.276.795.304	3.282.797.966.310	17,5%
2020	591.343.787.160	3.152.402.455.712	18,8%

Sumber : Diolah penulis (2021) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan [LRA Kabupaten Cilacap](#)

Berdasarkan tabel di atas, PAD yang diterima Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap terhadap total pendapatan daerah yang belum melebihi setengah pendapatan daerah. Penerimaan daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah berupa belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Cilacap lebih besar pada belanja operasi yang sifatnya rutin dan berskala. Belanja daerah yang lebih didominasi pada belanja operasi menggambarkan suatu pemerintah daerah lebih mengutamakan pemenuhan belanja rutin daripada memprioritaskan belanja modal dalam memperhatikan pembangunan daerah. dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1.1
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2020

Sumber : Diolah penulis (2021) dari *LRA Kabupaten Cilacap*

Melihat data yang tertera pada tabel 1.1, tabel 1.2, dan gambar 1.1 dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Kabupaten Cilacap, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Cilacap belum optimal dalam menggali sumber daya daerahnya, memiliki tingkat ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, kontribusi PAD terhadap penerimaan total masih tergolong rendah, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap lebih memfokuskan pada belanja operasi. Diperlukan sinergitas usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan yang optimal dan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cilacap. Luasnya daerah dan potensi yang bagus di Kabupaten Cilacap mengharuskan adanya pelaksanaan otonomi yang optimal. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari besarnya penerimaan daerah yang bersumber dari dana eksternal atau dana transfer pemerintah, yang mengakibatkan rendahnya kontribusi PAD dalam penerimaan daerah. PAD yang rendah belum mampu untuk menutupi pengeluaran daerah yang berupa belanja daerah. Selain itu, belanja daerah yang menekankan pada belanja operasi menggambarkan besarnya pengeluaran rutin yang dikeluarkan daerah setiap tahunnya dibandingkan dengan belanja modal yang dikeluarkan sebagai bentuk pembangunan daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran ,kinerja keuangan pemerintah daerah

dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian dalam jurnal Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah (2017) dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hery Sutanto juga melakukan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan fokus penelitian pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Wita Liantino tahun 2018 meneliti tentang kinerja keuangan daerah yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Surakarta. Selanjutnya penelitian Nur Handayani tahun 2017 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015 berfokus pada kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan penelitian kualitatif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfokus pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa rasio yang mewakili unsur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dalam unsur penerimaan maupun pengeluaran yang berupa kewajiban dan belanja.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dan faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah, serta mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

II. METODE

Penelitian analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen atau catatan berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa laporan keuangan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah mengharuskan adanya pelaporan atas apa yang dikelola terhadap pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi yang akuntabel. Bertindak sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data dokumen keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cilacap tahun 2017, realisasi opini WTP Kabupaten Cilacap pada tahun 2014, 2015, dan 2016 masuk ke dalam kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang dalam hal ini belum memenuhi target pada opini WTP. Pada LKjIP Kabupaten Cilacap tahun 2017 tersebut, di tahun 2017 pemerintah telah mencapai target opini WTP yang hingga tahun 2021 berdasarkan LKjIP Kabupaten Cilacap tahun 2021 opini BPK masih tetap bertahan pada Wajar Tanpa Pengecualian.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur juga dengan adanya perhitungan rasio keuangan daerah. Peneliti melakukan analisis terhadap rasio keuangan daerah yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori Abdul Halim (2017) dan Mahmudi (2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan suatu indikator yang dapat mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerah secara mandiri dengan adanya kontribusi kecil atau tidak ada sama sekali dari pendapatan keuangan eksternal yang bersumber dari luar seperti pendapatan transfer dari pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat bukan pendapatan asli daerah. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pendapatan asli daerah sebagai indikator utama dalam mengukur kemandirian suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai subjek pajak dan retribusi daerah memiliki kewajiban dalam membayar secara tertib dan tepat waktu guna menunjang penerimaan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan eksternal yang diterima daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat berikut ini :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 berikut adalah realisasi penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, transfer, dan lain-lain pendapatan Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020:

Tabel 3.1
PAD dan Pendapatan Transfer Kabupaten Cilacap TA 2017-2020

Tahun	PAD	Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2016	428.598.349.897,42	2.009.215.450.885,00	358.196.543.872,00
2017	648.091.381.095,69	1.973.052.856.082,00	446.130.553.962,00
2018	527.577.740.281,47	1.928.606.984.854,00	615.927.739.652,00
2019	574.276.795.303,59	2.517.433.595.490,00	191.087.575.517,00
2020	591.343.787.160,48	2.346.223.145.232,00	214.835.523.320,00

Sumber : LRA Kabupaten Cilacap, diolah oleh Penulis

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan perhitungan berikut :

a. Tahun 2016 = $\frac{428.598.349.897,42}{2.009.215.450.885,00 + 358.196.543.872,00} \times 100\% = 18,10\%$

b. Tahun 2017 = $\frac{648.091.381.095,69}{1.973.052.856.082,00 + 446.130.553.962,00} \times 100\% = 26,79\%$

c. Tahun 2018 = $\frac{527.577.740.281,47}{1.928.606.984.854,00 + 615.927.739.652,00} \times 100\% = 20,73\%$

d. Tahun 2019 = $\frac{574.276.795.303,59}{2.517.433.595.490,00 + 191.087.575.517,00} \times 100\% = 21,20\%$

e. Tahun 2020 = $\frac{591.343.787.160,48}{2.346.223.145.232,00 + 214.835.523.320,00} \times 100\% = 23,09\%$

Tabel 3.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah TA 2016-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Kemandirian	Keterangan
2016	428.598.349.897,42	2.367.411.994.757,00	18,10	instruktif
2017	648.091.381.095,69	2.419.183.410.044,00	26,79	konsultif
2018	527.577.740.281,47	2.544.534.724.506,00	20,73	instruktif
2019	574.276.795.303,59	2.708.521.171.007,00	21,20	instruktif
2020	591.343.787.160,48	2.561.058.668.552,00	23,09	instruktif
Rata-rata			21,98	instruktif

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti, 2022

Kemandirian keuangan daerah yang masih berada di kategori instruktif menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Keberadaan tingkat kemandirian pada kategori ini masih sangat jauh dari standarisasi keuangan daerah yang dapat dikatakan mandiri. Kemandirian yang masih sangat rendah disebabkan besarnya suntikan dana yang dari pihak luar dibandingkan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Kurangnya kontribusi PAD dalam pendapatan asli daerah ini perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam rangka menggali sumber PAD secara optimal.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan suatu perhitungan yang dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kemampuan pencapaian target PAD yang telah ditentukan. Semakin tinggi prosentase rasio efektivitas PAD suatu daerah, berarti semakin baik, efektif, dan tinggi pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan pemenuhan pencapaian realisasi dengan target minimal 100 persen atau sama dengan 1 (satu). Berikut formula rasio efektivitas PAD :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas, berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 sampai 2020 :

- a. Tahun 2016 = $\frac{428.598.349.897,42}{387.045.051.000} \times 100\% = 110,74\%$
b. Tahun 2017 = $\frac{648.091.381.095,69}{612.077.977.866} \times 100\% = 105,88\%$
c. Tahun 2018 = $\frac{527.577.740.281,47}{497.353.613.147} \times 100\% = 106,08\%$
d. Tahun 2019 = $\frac{574.276.795.303,59}{553.906.636.361} \times 100\% = 103,68\%$
e. Tahun 2020 = $\frac{591.343.787.160,48}{561.113.709.065} \times 100\% = 105,39\%$

Tabel 3.3 merupakan hasil perhitungan di atas dengan dilengkapi keterangan yang berisi tingkat efektivitas sudah masuk efektif atau belum :

Tabel 3.3

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Cilacap TA 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas	Keterangan
2016	428.598.349.897,42	387.045.051.000,00	110,74	sangat efektif
2017	648.091.381.095,69	612.077.977.866,00	105,88	sangat efektif
2018	527.577.740.281,47	497.353.613.147,00	106,08	sangat efektif
2019	574.276.795.303,59	553.906.636.361,00	103,68	sangat efektif
2020	591.343.787.160,48	561.113.709.065,00	105,39	sangat efektif
Rata-rata			106,35	sangat efektif

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan data yang dicantumkan dalam tabel 3.3, dapat dilihat prosentase efektivitas PAD Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun anggaran 2016 sampai 2020 mendapat rata-rata 106,35 % dengan kategori sangat efektif dan pada tiap tahunnya tingkat efektivitas berada pada posisi di atas 100% atau sama dengan 1 (satu). Besarnya prosentase tahun 2016 dengan jumlah target dan realisasi yang tidaksebanyak tahun setelahnya menggambarkan bahwa upaya dan usaha pemerintah dalam pencapaian realisasi sangat mempengaruhi tingkat efektivitas PAD. Upaya dan usaha yang besar pemerintah dengan menekan pengeluaran dalam hal biaya pemerolehnya menjadi factor penting dalam mengukur kinerja keuangan yang berkaitan dengan dengan efektivitas PAD

c. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD menggambarkan perbandingan dari realisasi biaya yang dikeluarkan dalam proses pencapaian realisasi PAD dengan jumlah realisasi PAD itu sendiri. Rasio ini digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam memanfaatkan anggaran yang ada dalam pemenuhan pendapatan secara efisien. Penilaian terhadap tingkat efisiensi PAD dapat memperkuat penilaian kinerja keuangan daerah terutama berkaitan dengan efektifitas PAD. Suatu pemerintah daerah bisa dikatakan efektif dan efisien apabila dapat memenuhi realisasi sesuai dengan target dan diimbangi dengan pengeluaran biaya pemerolehan realisasi tidak terlalu besar dan sesuai dengan porsi realisasi tersebut. Berikut formula rasio efisiensi PAD:

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 berikut ini adalah rincian biaya pemerolehan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap dalam tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 :

Tabel 3.4
Rincian Biaya Pemerolehan PAD Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Insentif Pemungutan Pajak	Insentif Pemungutan Retribusi	Total Biaya Pemerolehan
2016	5.933.553.251,00	619.395.826,00	6.552.949.077,00
2017	6.256.949.041,00	720.307.054,00	6.977.256.095,00
2018	7.179.606.659,00	754.871.403,00	7.934.478.062,00
2019	8.878.659.045,00	780.122.242,00	9.658.781.287,00
2020	4.103.058.249,00	369.603.944,00	4.472.662.193,00

Sumber : LRA Kabupaten Cilacap, 2022

Tabel 3.5 berikut adalah total pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2016-2020 :

Tabel 3.5
Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016-2020

Pendapatan Pajak	Pendapatan Retribusi	Total Pendapatan
137.808.910.786,00	31.090.888.236,00	168.899.799.022,00
156.393.830.406,00	32.433.916.350,00	188.827.746.756,00
185.943.092.741,00	43.486.837.366,00	229.429.930.107,00
209.475.848.896,00	44.740.277.398,00	254.216.126.294,00
203.118.563.271,00	18.969.873.119,00	222.088.436.390,00

Sumber : LRA Kabupaten Cilacap, 2022

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah dilihat dari pajak dan retribusi Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2016 sampai 2020 menghasilkan prosentase berikut ini :

a. Tahun 2016 = $\frac{6.552.949.077,00}{168.899.799.022,00} \times 100\% = 3,88\%$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Tahun 2017} &= \frac{6.977.256.095,00}{188.827.746.756,00} \times 100\% = 3,70\% \\
 \text{c. Tahun 2018} &= \frac{7.934.478.062,00}{229.429.930.107,00} \times 100\% = 3,46\% \\
 \text{d. Tahun 2019} &= \frac{9.658.781.287,00}{254.216.126.294,00} \times 100\% = 3,80\% \\
 \text{e. Tahun 2020} &= \frac{4.472.662.193,00}{222.088.436.390,00} \times 100\% = 2,01\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dicantumkan dalam tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016-2020

Total Biaya Pemerolehan	Total Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
6.552.949.077,00	168.899.799.022,00	3,88	Sangat Efisien
6.977.256.095,00	188.827.746.756,00	3,70	Sangat Efisien
7.934.478.062,00	229.429.930.107,00	3,46	Sangat Efisien
9.658.781.287,00	254.216.126.294,00	3,80	Sangat Efisien
4.472.662.193,00	222.088.436.390,00	2,01	Sangat Efisien
Rata-Rata		3,37	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 3.6 rasio efisiensi tersebut, dapat dikatakan rasio efisiensi keuangan daerah dilihat dari pajak dan retribusi daerah masuk ke dalam kategori sangat efisien sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi. Tiap tahunnya, rasio efisiensi mengalami naik turun.

Tingkat efisiensi tertinggi antara tahun 2016 sampai 2020 terjadi di tahun 2020, meskipun biaya perolehan dan realisasi kecil. Semakin kecil nilai prosentase rasio efisiensi, semakin tinggi tingkat efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya guna pencapain target. Prosentase terbesar rasio efisiensi Kabupaten Cilacap terdapat pada tahun 2016 sebesar 3,88% yang menandakan bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, tahun 2016 masih kurang efisien. Realisasi pendapatan yang tinggi perlu diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan optimal dan tidak berlebihan.

d. Rasio Keserasian

Pemerintah daerah memiliki prioritas dalam penggunaan belanjanya. Alokasi dana dapat diprioritaskan pada belanja operasiional ataupun belanja modal dalam pembangunan, pelayanan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal. Rasio keserasian yang digunakan dalam penelitian terhadap keuangan daerah Kabupaten Cilacap yaitu perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

a) Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah. Hasil dari perhitungan ini dapat memberikan informasi seberapa besar porsi yang dialokasikan pemerintah untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan keseharian pemerintah daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran atau bermanfaat untuk jangka pendek. Belanja operasi bisa dikatakan sebagai

belanja rutin karena sifatnya berulang untuk setiap tahun anggaran. Umumnya, pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan dananya untuk belanja operasi ini. Perhitungan rasio keserasian terkait rasio belanja operasi dalam mengukur besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dapat diukur dengan menggunakan formula berikut ini :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan rasio belanja operasi daerah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 :

- a. 2016 = $\frac{2.304.600.214.823}{3.150.325.840.872} \times 100\% = 73,15\%$
- b. 2017 = $\frac{2.360.680.782.998,01}{3.150.325.840.872} \times 100\% = 78,32\%$
- c. 2018 = $\frac{2.434.551.928.596}{2.985.422.839.102,00} \times 100\% = 81,55\%$
- d. 2019 = $\frac{2.116.419.108.705}{2.779.740.306.711,20} \times 100\% = 76,14\%$
- e. 2020 = $\frac{2.118.332.170.798}{2.607.739.427.660,00} \times 100\% = 81,23\%$

Tabel 3.7 berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio belanja operasi daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 3.7
Rasio Belanja Daerah Kabupaten Cilacap TA 2016-2020

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio BO
2016	2.304.600.214.823,00	3.150.325.840.872,00	73,15
2017	2.360.680.782.998,01	3.014.110.475.842,01	78,32
2018	2.434.551.928.596,00	2.985.422.839.102,00	81,55
2019	2.116.419.108.705,00	2.779.740.306.711,20	76,14
2020	2.118.332.170.798,00	2.607.739.427.660,00	81,23
Rata-Rata			78,08

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Hasil rasio keserasian belanja operasi mengalami kondisi fluktuasi atau naik turun. Prosentase tahun 2017 dan 2018 meningkat setiap tahunnya. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi daerah yaitu sebesar 78,08%, yang mana dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai keseharian pemerintahan tiap tahunnya.

Belanja daerah Kabupaten Cilacap yang dikeluarkan untuk operasional pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun dihitung dari tahun 2016, besarnya melebihi setengah dari belanja daerah yaitu lebih dari 50%. Hal ini menyatakan bahwasanya biaya operasional pemerintah daerah Kabupaten Cilacap cukup besar tiap tahunnya dan sudah sesuai dengan teori Mahmudi yang pada umumnya belanja operasi berada pada kisaran 60-90%.

b) Rasio Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Belanja modal memberikan manfaat untuk jangka menengah hingga jangka panjang yang tiap tahunnya dianggarkan. Umumnya, proporsi

belanja modal dalam belanja daerah yaitu sebesar 5-20%. Perhitungan keserasian belanja modal dapat dihitung dengan membandingkan total belanja modal terhadap belanja daerah, dengan rumus yang dapat dilihat berikut ini :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio keserasian belanja modal daerah menggambarkan besarnya alokasi dana pemerintah dalam pembangunan daerah melalui belanja modal. Pembangunan ini sebagai bentuk investasi pemerintah daerah untuk keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik. Perhitungan rasio keserasian untuk belanja modal pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dilihat berikut ini :

- a. Tahun 2016 = $\frac{843.986.253.460}{3.150.325.840.872} \times 100\% = 26,79\%$
 b. Tahun 2017 = $\frac{650.976.458.792}{3.014.110.475.842,01} \times 100\% = 21,60\%$
 c. Tahun 2018 = $\frac{550.840.750.506}{2.985.422.839.102,00} \times 100\% = 18,45\%$
 d. Tahun 2019 = $\frac{663.321.198.006,20}{2.779.740.306.711,20} \times 100\% = 23,86\%$
 e. Tahun 2020 = $\frac{462.431.933.784}{2.607.739.427.660,00} \times 100\% = 17,73\%$

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Cilacap TA 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio BM
2016	843.986.253.460,00	3.150.325.840.872,00	26,79
2017	650.976.458.792,00	3.014.110.475.842,01	21,60
2018	550.840.750.506,00	2.985.422.839.102,00	18,45
2019	663.321.198.006,20	2.779.740.306.711,20	23,86
2020	462.431.933.784,00	2.607.739.427.660,00	17,73
Rata-Rata			21,69

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio keserasian untuk belanja modal pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 samapai dengan tahun 2020 di atas 20% yaitu sebesar 21,69%. Tahun 2016 merupakan tingkat keserasian rasio belanja modal tertinggi dibanding lima tahun tersebut. Melihat perhitungan rasio ini, Kabupaten Cilacap dalam mengalokasikan dananya untuk belanja modal mengalami fluktuasi, yaitu perkembangan naik turun.

Mahmudi menyatakan bahwsanya proporsi umum untuk belanja modal yaitu sebesar 5-20%. Kabupaten Cilacap sudah berada pada posisi ini dan bahkan beberapa tahun memiliki rasio keserasian belanja modal lebih dari 20%.

e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Daerah diberikan alternative lain dalam membiayai pambangunan dengan menggunakan sumber dana lain seperti melakukan pinjaman yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam membayar pinjaman ke depannya. Guna mengukur seberapa besar

kemampuan daerah dalam membayar utang dapat dilihat dengan melakukan perhitungan DSCR yaitu Debt Service Coverage Ratio.

Debt Service Coverage Ratio atau dikenal dengan DSCR merupakan rasio perhitungan yang membandingkan penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW) dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Berikut formula perhitungan DSCR :

$$DSCR = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - Belanja Wajib}{Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain}$$

Bagian daerah atau BD dalam perhitungan tersebut merupakan dana bagi hasil yang telah dikurangi dana bagi hasil dana reboisasi. Dana reboisasi merupakan dana yang diberikan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Belanja wajib atau BW merupakan belanja yang dikeluarkan daerah dalam belanja pegawai.

Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki hutang atau kewajiban jangka pendek, yaitu diantaranya utang perhitungan pihak ketiga, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan otonomi masih dapat teratasi dengan pendapatan yang diterima, meskipun masih dimiliki kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Cilacap dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 besarnya nol rupiah. Tidak adanya kewajiban jangka panjang yang harus disetorkan dalam tiap tahunnya yang berupa angsuran pokok, bunga, dan biaya lainnya, menerangkan tidak adanya tanggungan yang dimiliki pemerintah tiap tahunnya. Sehingga, apabila dilakukan perhitungan terhadap *debt service coverage ratio* (DSCR), maka tidak akan ada nilai yang terdefinisi. Tidak memiliki tanggungan yang harus dibayarkan tiap tahunnya mengartikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap cukup bagus dalam mengurangi beban daerah dalam membayar angsuran dan bunga tiap tahunnya.

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Adanya perhitungan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran daerah ini, dapat menjadi bentuk evaluasi daerah terkait potensi yang perlu mendapatkan perhatian baik itu dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah akan terus meningkat dan tercapainya kemandirian yang tinggi. Formula rasio pertumbuhan dapat dilihat berikut ini :

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_{n-1}} \times 100\%$$

a) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah memberikan gambaran terkait kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif menandakan bahwa realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

Berikut adalah perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Cilacap :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2016} &= \frac{428.598.349.897,42 - 409.845.660.919}{409.845.660.919} \times 100\% = 4,58\% \\ \text{b. Tahun 2017} &= \frac{648.091.381.095,69 - 428.598.349.897,42}{428.598.349.897,42} \times 100\% = 51,21\% \\ \text{c. Tahun 2018} &= \frac{527.577.740.281,47 - 648.091.381.095,69}{648.091.381.095,69} \times 100\% = -18,60\% \\ \text{d. Tahun 2019} &= \frac{574.276.795.303,59 - 527.577.740.281,47}{527.577.740.281,47} \times 100\% = 8,85\% \\ \text{e. Tahun 2020} &= \frac{591.343.787.160,48 - 574.276.795.303,59}{574.276.795.303,59} \times 100\% = 2,97\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Cilacap tersebut dapat dilihat melalui tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Cilacap TA 2015-2020

Tahun	PAD t_0	PAD t_1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	409.845.660.919,00	428.598.349.897,42	4,58
2016-2017	428.598.349.897,42	648.091.381.095,69	51,21
2017-2018	648.091.381.095,69	527.577.740.281,47	-18,60
2018-2019	527.577.740.281,47	574.276.795.303,59	8,85
2019-2020	574.276.795.303,59	591.343.787.160,48	2,97

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau naik turun. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD yang naik turun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun anggaran 2016 ke 2017, pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif yang sangat signifikan, yaitu dari 4,58% menjadi 51,21%. Akan tetapi, di tahun berikutnya yaitu pertumbuhan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami pertumbuhan negative atau mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup drastic yaitu dari 51,21% menjadi -18,60%. Pertumbuhan PAD yang naik turun ini menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakstabilan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kinerja terendah pemerintah Kabupaten Cilacap berdasarkan perhitungan tersebut terlihat pada titik -18,50% yaitu rasio di tahun 2018 dengan berpedoman tahun 2017.

Perlu adanya perhatian khusus dari daerah terkait pertumbuhan ini agar kemandirian keuangan daerah dapat tercapai dan tingkat ketergantungan dengan dana transfer dapat terkendali. Penurunan realisasi PAD dari tahun sebelumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu yang terjadi di tahun 2020 pandemi covid-19 yang hampir melumpuhkan perekonomian karena adanya PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar.

b) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Rasio pertumbuhan pendapatan transfer digunakan untuk mengukur besarnya pertumbuhan dana yang diterima pemerintah daerah dari pihak eksternal yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain yang dalam keuangan daerah kabupaten bisa berkaitan dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten lain. Semakin besarnya penerimaan daerah yang didapatkan dari dana transfer menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah semakin tinggi. Pendapatan transfer yang diterima pemerintah Kabupaten Cilacap berupa pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah daerah provinsi lain sebagai bentuk bantuan keuangan, pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak/ bukan pajak, DAU, dan DAK, serta dana transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian. Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan transfer dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Real Penerimaan Transfer } X_n - X_{n-1}}{\text{Real Penerimaan Transfer } X_{n-1}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan formula rasio pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2015-2020 :

a. Tahun 2015 – 2016 = $\frac{2.009.215.450.885 - 1.997.861.978.187}{1.997.861.978.187} \times 100\% = 0,57\%$

b. Tahun 2016 – 2017 = $\frac{1.973.052.856.082 - 2.009.215.450.885}{2.009.215.450.885} \times 100\% = -1,80\%$

c. Tahun 2017 – 2018 = $\frac{1.928.606.984.854 - 1.973.052.856.082}{1.973.052.856.082} \times 100\% = -2,25\%$

d. Tahun 2018 – 2019 = $\frac{2.517.433.595.490 - 1.928.606.984.854}{1.928.606.984.854} \times 100\% = 30,53\%$

e. Tahun 2019 – 2020 = $\frac{2.346.223.145.232 - 2.517.433.595.490}{2.517.433.595.490} \times 100\% = -6,80\%$

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dana transfer Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2015-2020 ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Cilacap TA 2015-2020

Tahun	Transfer t_0	Transfer t_1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	1.997.861.978.187,00	2.009.215.450.885,00	0,57
2016-2017	2.009.215.450.885,00	1.973.052.856.082,00	-1,80
2017-2018	1.973.052.856.082,00	1.928.606.984.854,00	-2,25
2018-2019	1.928.606.984.854,00	2.517.433.595.490,00	30,53
2019-2020	2.517.433.595.490,00	2.346.223.145.232,00	-6,80

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2022

Pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2015 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau naik . Pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun anggaran 2017 sampai 2020. Tahun anggaran 2017-2018 menandakan berada di titik negatif dan kemudian melonjak naik di tahun anggaran 2018-2019 sebesar 30% lebih. Akan tetapi, di tahun berikutnya merosot langsung menjadi bernilai negative. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap belum stabil dalam mengelola keuangannya. Tingginya rasio pertumbuhan pendapatan transfer daerah justru menandakan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masih sangat tinggi. Sebaliknya, rendahnya rasio pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi dengan menekan aliran tranfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain.

c) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan, mengurangi, dan meningkatkan belanja daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat memperkuat perhitungan rasio efisiensi. Berikut formula rasio pertumbuhan belanja daerah :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Daerah } X_{n-1}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan tahun anggaran 2015 sampai 2020 :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2015 - 2016} &= \frac{3.150.325.840.872 - 2.657.124.478.070}{2.657.124.478.070} \times 100\% = 18,56\% \\ \text{b. Tahun 2016 - 2017} &= \frac{3.014.110.475.842,01 - 3.150.325.840.872}{3.150.325.840.872} \times 100\% = -4,32\% \\ \text{c. Tahun 2017 - 2018} &= \frac{2.985.422.839.102 - 3.014.110.475.842,01}{3.014.110.475.842,01} \times 100\% = -0,95\% \\ \text{d. Tahun 2018 - 2019} &= \frac{2.779.740.306.711,2 - 2.985.422.839.102}{2.985.422.839.1020} \times 100\% = -6,89\% \\ \text{e. Tahun 2019 - 2020} &= \frac{2.607.739.427.660 - 2.779.740.306.711,2}{2.779.740.306.711,2} \times 100\% = -6,19\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap tersebut ditampilkan dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap TA 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah t_0	Belanja Daerah t_1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	2.657.124.478.070,00	3.150.325.840.872,00	18,56
2016-2017	3.150.325.840.872,00	3.014.110.475.842,01	-4,32
2017-2018	3.014.110.475.842,01	2.985.422.839.102,00	-0,95
2018-2019	2.985.422.839.102,00	2.779.740.306.711,20	-6,89
2019-2020	2.779.740.306.711,20	2.607.739.427.660,00	-6,19

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 3.11, pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif atau naik turun. Rasio tertinggi berada pada tahun 2015-2016 dengan belanja daerah tahun 2016 merupakan belanja tertinggi selama 6 tahun anggaran. Selain tahun 2015-2016, seluruh titik pertumbuhan berada pada posisi negative. meskipun besarnya naik turun.

3.2 Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Penyelenggaraan urusan pemerintahan erat kaitannya dengan adanya keuangan yang dibutuhkan untuk mendanai segala aktivitas dan kegiatan pemerintah daerah. Keuangan yang dibutuhkan pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Guna meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan, pemerintah daerah diuntut untuk dapat meningkatkan dan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menekan pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah perlu diperhatikan agar sumber daya yang menjadi pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam pencapaian kemandirian dan meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerah lain menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yaitu adanya perubahan aturan yang mengharuskan adanya *refocusing*, pandemi yang menurunkan seluruh sektor dan mempengaruhi penerimaan, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak, serta penerapan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat.

Para pegawai dalam bidang pendataan telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal penetapan pajak dan retribusi, sudah dilakukan berbagai perhitungan yang tepat dengan disesuaikan dengan jumlah objek yang terbaru di lapangan. Terlihat dari adanya pendataan ulang bagi objek pajak yang sudah dimulai dari 3 kecamatan di Cilacap yaitu kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Dalam meningkatkan kinerja keuangan terutama PAD, memerlukan peran penting masyarakat untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagusnya sumber daya aparatur perlu diimbangi dengan kontribusi dari masyarakat yang tinggi.

3.3 Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Faktor penghambat dalam peningkatan kinerja keuangan daerah perlu segera diperhatikan dan diatasi permasalahannya demi kelancaran dalam mewujudkan kemandirian daerah, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensifikasi dan ekstensifikasi umumnya dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Intensifikasi merupakan tindakan dalam pengoptimalan penggalan pendapatan asli daerah yang dalam hal ini adalah pajak dengan berdasarkan data subjek dan objek pajak yang telah terdaftar dan tercatat sebelumnya. Sedangkan Ekstensifikasi adalah usaha dalam menungkatkan PAD dengan menambahkan sumber penerimaan yang belum tercatat dan belum mendaftarkan diri. Ekstensifikasi dan intensifikasi dilakukan sebagai upaya

peningkatan PAD dalam pengurangan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi akan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

2. Reward dan Punishment

Pemerintah daerah menerapkan adanya *reward* dan *punishment*. *Reward* merupakan bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. *Reward* dapat berupa adanya undian hadiah yang berisi sepeda motor, TV, dan lain sebagainya. *Punishment* yaitu berupa adanya denda. Karena sistem yang dilakukan sudah dilakukan secara online, sehingga penentuan denda bagi yang tidak membayar tepat waktu akan terlihat secara otomatis besaran denda yang harus dibayarkan.

3. Meningkatkan transaksi non tunai

Pelaksanaan transaksi non tunai akan memberikan transparansi yang jelas pengeluaran dan pemasukan yang diterima pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

4. Meningkatkan inovasi pemerintah daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam mendukung visi dan misi daerah telah melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana dan profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan pelayanan prima. BPPKAD Kabupaten Cilacap melakukan inovasi dalam memudahkan daya saing dengan melalui “JABAT TANGAN” yang berarti pajak bersahabat tenang dan nyaman. Pelayanan ini dapat menjangkau wajib pajak yang berkedudukan jauh dari pusat pemerintahan dengan cara jemput bola melalui tatap muka langsung dengan wajib pajak dengan mobilitas mobil pajak keliling. Di samping melakukan layanan pembayaran, konsultasi juga memberikan edukasi atas pajak yang telah bayar dengan mempertahankan potensi pajak yang ada sekaligus menggali potensi lainnya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis rasio keuangan daerah yang dilakukan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Cilacap sudah sangat baik, tetapi tingkat kemandirian masih jauh dari kata mandiri atau masih sangat rendah dan rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif serta rasio keserasian lebih banyak alokasi pada belanja operasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah (2017) yang menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Gunung Kidul masih tergolong sangat rendah dan tingkat efektivitas PAD dikatakan efektif serta alokasi belanja lebih condong pada belanja operasi, tetapi rasio efisiensi belum efisien. Berbeda dengan temuan yang dilakukan dalam penelitian Wita Liantino (2018) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian pada BPPKAD Surakarta dianggap tinggi dan rasio efektivitas PAD dan efisiensi belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Temuan pada penelitian yang dilakukan Hery Sutanto (2019) menunjukkan bahwa porsi belanja operasi lebih besar daripada belanja modal dengan tingkat efektivitas dikategorikan efektif tetapi rasio efisiensi tidak efisien. Penelitian yang dilakukan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Cilacap ini menggambarkan rendahnya kemandirian daerah dan tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada suntikan dana transfer yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan pola instruktif pada rasio kemandirian keuangan daerah. Trend naik turun atau fluktuatif pada rasio pertumbuhan PAD, Pendapatan transfer, dan belanja daerah.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan factor-faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada Kabupaten Cilacap. Dana transfer yang tergolong tinggi ini merupakan hal yang tidak terduga bagi peneliti melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap. Selain itu, adanya DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) menjadi hal baru dalam penelitian diantara penelitian yang lain, serta sterilnya kewajiban jangka panjang Kabupaten Cilacap merupakan hal yang menarik dari penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2017-2020 telah mendapat tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dengan beberapa poin yang harus diperbaiki terutama dalam hal penatausahaan asset. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2016 sampai 2020 masih tergolong sangat rendah atau masih sangat tergantung pada aliran dana transfer. Tingkat pencapaian realisasi terhadap target PAD sudah sangat efektif dan mampu mencapai target yang telah ditentukan bahkan lebih. Tingkat efisiensi dalam pengeluaran biaya dalam mewujudkan realisasi sudah bisa dikatakan sangat efisien, karena realisasi yang diterima besar dengan pengeluaran yang sesuai. Dilihat dari rasio keserasian, pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja operasi. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak memiliki pinjaman jangka panjang sejak 2014. Apabila dilihat dari rasio pertumbuhan, keuangan daerah mengalami perubahan yang fluktuatif dengan perbedaan yang cukup signifikan.
2. Faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 sampai 2020, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perubahan aturan yang mengharuskan adanya *refocusing*;
 - b. Pandemi yang menurunkan seluruh sektor dan mempengaruhi penerimaan;
 - c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak;
 - d. Penerapan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat.
3. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran Selanjutnya
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - b. *Reward* dan *punishment*
 - c. Melakukan transaksi nontunai
 - d. Meningkatkan inovasi pemerintah daerah

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi dan Abdul Halim.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti ingin memberikan beberapa saran dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu memperhatikan lagi hal-hal yang kiranya dapat menjadi sumber potensi penerimaan daerah seperti memperhatikan secara khusus BUMD agar terus berkembang.
2. Melakukan pendataan, penetapan, dan penyesuaian secara berkala terhadap subjek dan objek pajak;
3. Memberikan pelatihan ke desa-desa dalam hal proses pembayaran pajak yang sudah dilakukan secara *online* agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik dan lancar. Kemudian kepada keluarga khususnya orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap hal yang dilakukan peneliti demi kelancaran penelitian. Terimakasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing hingga tuntasnya penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap yang telah berkenan menjadi lokus penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk penelitian ini. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Fathah, R. N. 2017. “*Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*”, Ebbank Vol. 8, Yogyakarta: LP3M STIEBBANK
- Handayani, Nur. 2017. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015*”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6, Surabaya: ISSN
- Liantino, W. 2018. “*Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan*

Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Susanto, H. 2019. “*Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*”, *Distribusi - Journal of Management and Business* Vol. 7, Mataram

<https://www.kemenkeu.go.id>. *Memahami Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa*. Minggu, 28 Agustus 2021

<http://p2k.itbu.ac.id>. *Kabupaten Cilacap Ensiklopedia Dunia*. Minggu, 28 Agustus 2021

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. *Anggaran dan Realisasi*. Minggu, 28 Agustus 2021

